



**PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS (PENGENDALI PERKARA)
PENUNTUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN**

DEDDY SUTENDY

1320922106

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2016**



**PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS (PENGENDALI PERKARA)
PENUNTUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

DEDDY SUTENDY

1320922106

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2016**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Nama : Deddy Sutendy

NRP : 1320922106

Tanggal :

Jakarta,

2015

Yang Menyatakan,



Deddy Sutendy

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deddy Sutendy
NRP : 1320922106
Program : Pascasarjana
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non Ekslusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS (PENGENDALI PERKARA)
PENUNTUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN**

Beserta perangkat yang ada. Dengan hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 2015

Yang menyatakan



Deddy Sutendy

PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh :

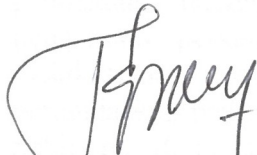
Nama : Deddy Sutendy

NRP : 1320922106

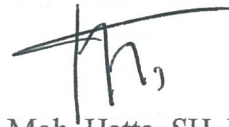
Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Tesis : Penerapan Asas Dominus Litis (Pengendali Perkara)
Penuntutan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Telah berhasil dipertahankan dalam pengujian di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.



Dr. Erni Agustina, SH, Sp.N
Ketua Penguji



Dr. Moh. Hatta, SH, MH
Penguji Ahli



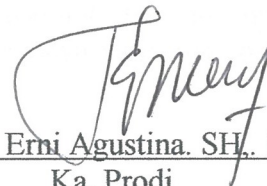
Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, SH., MH. APU
Penguji 1/ Pembimbing



Dr. Arrisman. SH, MH
Penguji 2/ Pembimbing



Dr. Iwan Kresna Setiadi. SE., MM
Direktur



Dr. Erni Agustina. SH., Sp.N
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian :

PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS (PENGENDALI PERKARA) PENUNTUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN

Deddy Sutendy

Abstrak

Peran dan fungsi yang sangat besar dalam proses peradilan pidana, jaksa menjadi pengendali proses penanganan perkara atau dominus litis, karena jaksa-lah yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Tujuan penelitian tesis ini adalah Mengetahui penerapan asas dominus litis (penguasa/pengendali perkara) dapat diterapkan terhadap kejaksaan yang berwenang melaksanakan penuntutan. Mengambarkan kedudukan jaksa pada kejaksaan dan jaksa pada KPK yang memegang asas dominus litis (penguasa perkara) dan prinsip een eln endelbaar (jaksa satu dan tidak terpisahkan) dalam sistem peradilan pidana. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan terhadap dualism kewenangan penuntutan yang dimiliki oleh jaksa pada KPK agar proses penegakan hukum dapat dilaksanakan secara harmonis dan terpadu. Berdasarkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang diketahui bahwa Asas dominus litis (penguasa/pengendali perkara) dapat diterapkan terhadap kejaksaan yang berwenang melaksanakan penuntutan Mengacu pada single prosecution system dan berlandaskan pada prinsip en een ondeelbaar jaksa itu satu dan tidak terpisahkan. Sehingga, di negara manapun di dunia yang memiliki lembaga seperti KPK, penuntutan tetap dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kedudukan jaksa pada kejaksaan dan jaksa pada KPK masing-masing memiliki kewenangan dalam memegang asas dominus litis (penguasa perkara). Namun kewenangan yang dimiliki lebih khusus hanya pada kasus tindak pidana korupsi. Kewenangan penuntutan yang diberikan oleh undang-undang kepada KPK merupakan kewenangan yang sah.UU tentang Kejaksaan RI merupakan UU yang mengatur secara umum keberadaan dan kewenangan Jaksa dan UU Kejaksaan tersebut dapat dikesampingkan dengan UU KPK yang merupakan aturan khusus. Kewenangan penuntutan pada KPK adalah konstitusional, hal ini dipertegas dengan sejumlah putusan dari Mahkamah Kontitusi. Upaya yang bias dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan terhadap

Kata kunci : Pengendali, Penuntutan dan Kejaksaan

**APPLICATION OF PRINCIPLE OF LITIS DOMINUS (CASE
CONTROLLER) PROSECUTION ACCORDING TO THE LAW
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 16 OF 2004
ABOUT AGO**

Deddy Sutendy

Abstract

The role and function very large in the process of criminal justice, the prosecutor becomes the controlling process of handling cases or dominus litis, because the prosecutor was the one that can determine whether a case can be submitted to the court or not based on valid evidence under the law of criminal procedure. The research objective of this thesis is the application of the principle Knowing dominus litis (ruler/controller case) can be applied to the prosecutor's authority to implement prosecution. A portrait position prosecutor at the prosecutor and the prosecutor on the Commission which holds the principle of dominus litis (court ruling) and ELN een principle endelbaar (attorney one and inseparable) in the criminal justice system. Knowing the efforts made by the Public Prosecutor at the Attorney for prosecution dualism of authority possessed by prosecutors on the Commission to make the process of law enforcement can be implemented in a harmonious and unified. Based on legal research methods normative approach to law known that the principle of dominus litis (ruler / controller case) can be applied to the prosecutor who authorized the prosecution Referring to implement single prosecution system and based on the principle that the prosecution ondeelbaar en een one and inseparable. Thus, in any country in the world which has an institution like the Commission, the prosecution is still being done by the Attorney General. The position of the prosecutor in the prosecutor's office and the prosecutor on the Commission each have jurisdiction in holding the principle of dominus litis (court ruling). However, the authority is more specifically only in cases of corruption. Prosecutorial powers granted by law to the Commission is the authority of the Attorney RI sah.UU the general legislation governing the existence and authority of the Prosecutor and the Attorney Act can be overridden by the Law Commission which is a specific rule. Prosecutorial powers on the Commission is constitutional, it is confirmed by a ruling of the Constitutional Court. Efforts can be done by the Public Prosecutor at the Attorney for prosecution dualism of authority possessed by prosecutors on the Commission to make the process of law enforcement can be implemented in a harmonious and integrated are eliminating the ego resulting institution counterproductive to the functioning of the institution.

Keywords: Control, Prosecution and the Attorney

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul: “Penerapan Asas Dominus Litis (Pengendali Perkara) Penuntutan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan”.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat. kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Eddy S. Siradj. MSc., Eng selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional - UPN "Veteran" Jakarta.
2. Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH., MH., APU selaku Pembimbing I.
3. DR. Arrisman, SH., MH selaku Pembimbing II.
4. Dr. Erni Agustina, SH, SPN selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum yang dalam kesibukannya telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis ,sehingga tesis ini dapat selesai.
5. Seluruh dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional - UPN "Veteran" Jakarta yang telah memberikan pembekalan perkuliahan.
6. Seluruh staf sekretariat Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional UPN "Veteran" Jakarta yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis mengikuti program tersebut.
7. Seluruh rekan-rekan penulis baik di Kejaksaan Agung maupun di kampus Universitas Pembangunan Nasional- UPN "Veteran" Jakarta.
8. Seluruh rekan-rekan dvokat, Polisi, Jaksa dan pihak-pihak yang tidak bias saya sebutkan satu persatu.
9. Yang terutama penulis ucapkan terima kasih yang mendalam pada keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, doa serta perhatian.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.

Jakarta, 2015

Deddy Sutendy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	6
I.3 Tujuan Penelitian.....	9
I.4 Manfaat Penelitian.....	9
I.5 Kerangka Teori dan Konseptual.....	10
I.6 Sistematika Penulisan	22
BAB II ASAS DOMINUS LITIS DALAM LEMBAGA PENUNTUTAN BERDASARKAN SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA	24
II.1 Asas Dominus Litis di Lembaga Kejaksaan.....	24
II.2 Kekuasaan Penuntutan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia..	27
II.3 Kekuasaan Penuntutan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia..	27
II.4 Kekuasaan Penuntutan dalam Fungsi Kekuasaan Negara	38
II.5 Independensi Kejaksaan di Indonesia.....	48
II.6 Implementasi Kekuasaan Penuntutan di Negara Hukum Indonesia.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
III.1 Jenis Penelitian	53
III.2 Sifat Penelitian.....	54
III.3 Sumber Data	55
III.4 Metode Pengumpulan Data.....	55
III.5 Metode Analisis Data	56
BAB IV PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS PADA KEJAKSAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA	57
IV.1 Eksistensi Asas Dominus Litis di Lembaga Kejaksaan.....	57
IV.2 Kedudukan Jaksa pada Kejaksaan dan Jaksa pada KPK Dalam Asas Dominus Litis.....	57
IV.3 Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan.....	65
IV.4 Upaya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Terhadap Dualisme Kewenang Penuntutan Yang Dimiliki Oleh Jaksa Pada KPK.....	79

BAB V PENUTUP.....	85
V.1 Kesimpulan	85
V.2 Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP